

B

**KEEFEKTIFAN PENGAWASAN LAHAN EKS
TANAH GANJARAN DI KOTA SURABAYA**

SKRIPSI

KK
FTS AN 16/03
Mur
h



Oleh

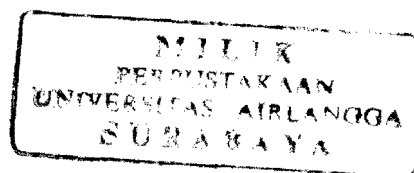
**NINDYA PRAWITA MURTI
NIM 079615352**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal 2002/2003**

KEEFEKTIFAN PENGAWASAN LAHAN EKS TANAH GANJARAN DI KOTA SURABAYA

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga**



Oleh

**NINDYA PRAWITA MURTI
NIM 079615352**

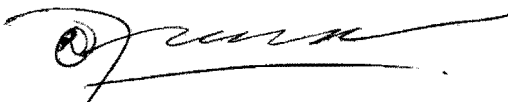
**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
Semester Gasal 2002/2003**

Halaman Persetujuan

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
untuk diujikan di depan Dewan Penguji

Surabaya, 19 Desember 2002

Dosen Pembimbing


Dra. Rochyati Wahyuni Triana, Ms
NIP. 131 570 345

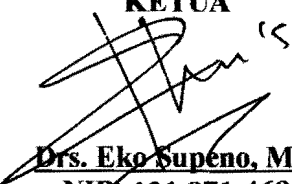
LEMBAR PENGESAHAN

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program Studi
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Airlangga pada :**

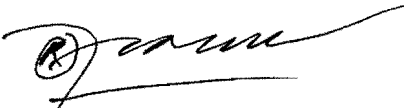
Hari : Kamis
Tanggal : 9 Januari 2003
Pukul : 12.00 WIB
Tempat : Ruang 250

Dewan Penguji terdiri dari :

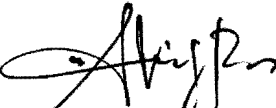
KETUA


Drs. Eko Supeno, MSi
NIP. 131 871 469

ANGGOTA


Dra. R. Wahyuni Triana, MSi
NIP. 131 570 345

ANGGOTA


Erna. S, SIP
NIP. 132 255 148

ABSTRAKSI

Perubahan status desa menjadi wilayah administratif kelurahan yang terjadi di kota Surabaya membawa dampak berubah pula status tanah ganjaran yang ada di desa-desa tersebut. Tanah ganjaran tidak lagi dimanfaatkan sebagai balas jasa atau gaji bagi kepala desa dan pamong desa yang sedang menjabat karena mereka telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil yang digaji oleh pemerintah daerah. Dan tanah ganjaran itu kemudian pengurusan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya. Di kota Surabaya sendiri pengawasan lahan eks tanah ganjaran dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Pemerintah Kota Surabaya. lahan eks tanah ganjaran tersebut oleh pemerintah kota Surabaya dimanfaatkan untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti masjid, kantor pemerintah, pengendalian banjir dan sebagainya. Namun kenyataan menunjukkan bahwa terdapat banyak masalah yang tak jarang menimbulkan konflik akibat dari pemanfaatan lahan eks tanah ganjaran yang kurang bijaksana sehingga merugikan masyarakat, khususnya masyarakat 'pemilik' tanah tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai keefektifan pengawasan pemanfaatan lahan eks tanah ganjaran di kota Surabaya dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif karena peneliti hendak menggambarkan secara rinci mengenai keefektifan pengawasan lahan eks tanah ganjaran dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata yang diperoleh dari informan serta tambahan dari dokumen dan literatur yang mendukung. Para informan ini terdiri dari pihak-pihak yang berwenang dalam mengawasi pemanfaatan lahan eks tanah ganjaran yaitu Bagian Pemerintahan dan Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Pemerintah Kota Surabaya serta dari pihak legislatif dan masyarakat sebagai triangulasi sumber terhadap informasi yang diperoleh. Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti mengadakan observasi dan wawancara mendalam dengan para informan terpilih serta dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan model interaktif dari Huberman.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Surabaya dalam mengawasi pemanfaatan lahan eks tanah ganjaran tidak efektif. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pengawasan lahan eks tanah ganjaran berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu komunikasi organisasi, koordinasi dan hubungan birokrasi dan politik serta satu faktor lagi yang didapat setelah peneliti menghadapi kenyataan di lapangan yaitu partisipasi masyarakat. Terdapat hubungan antar faktor yang saling mempengaruhi yaitu komunikasi organisasi dan koordinasi. Koordinasi antar instansi selalu membutuhkan komunikasi organisasi yang baik, begitu pula halnya dengan komunikasi organisasi yang harus selalu didukung oleh koordinasi sehingga terdapat keselarasan dalam pelaksanaan tugas dan pengawasan dapat dilakukan dengan efektif. Faktor lain yang saling berpengaruh yaitu hubungan birokrasi politik dan partisipasi masyarakat. Dominasi birokrasi pada setiap segmen